PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGANDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Penelitian Pada Instansi Pemerintah Kota Bandung)

YUSUP KOMARUDIN
Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia

Abstact : *This study aims to test how much influence the government accounting standards and internal control system of the quality of the financial statements in Bandung Government Agencies office. This study also aims to determine whether the accounting standards of governance and internal control systems significantly affect the quality of the financial statements. The method used in this research is descriptive and verification unit of analysis in this study is the Government Agency Bandung. Collection method used is the method where the entire sample census is taken as research. To determine the effect of government accounting standards and internal control system of financial reporting quality of the statistical testing using correlation analysis, analysis regression, and to test the hypothesis is then used t test. The results of this study indicate that each variable significant effect partially, the Governmental Accounting Standards variables significantly influence the quality of financial statements, and the Internal Control System significant effect on the quality of the Financial Statements. Both the results of these studies are categorized into either category, it shows that the standard and the system has not been fully implemented in accordance with government regulations.*
Keywords : Government Accounting Standards, Internal Control System, and the Quality of Financial Statements

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab atas akuntabilitas publik menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah, sehingga disinilah dampak strategisnya pada peran pengawasan dan juga peran setiap instansi atau SKPD dapat terlihat. (Jamanson Sinaga, 2005).

Dengan kata lain kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Untuk itu bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dimana SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. (Ovita Charolina, 2013).

Tuntutan bekerja ekstra itu sifatnya wajib karena dalam 3 tahun terakhir, opini WDP tersebut kadung melekat pada Pemerintah Kota Bandung setelah sebelumnya BPK sempat memberikan opini *Disclaimer* pada LKPD 2009. Empat persoalan utama yang selalu menjadi kendala dalam penyusunan LKPD Kota Bandung yaitu aset daerah berupa tanah dan bangunan, sertifikasi, pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos) dan piutang pajak. Pengelolaan aset daerah berupa tanah dan bangunan serta sertifikasi atas aset milik Pemerintah Kota Bandung menjadi persoalan yang hingga kini belum bisa diselesaikan. Selama ini DPRD terus mendorong pemerintah kota Bandung, khususnya Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPKAD) untuk memperbaiki pengelolaan aset-aset milik daerah. (Haru Shuandaru : Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, 2013).

Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2008 tentang SPIP. Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi

tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. (I Putu Upabayu Rama Mahaputra & I Wayan Putra, 2014).

Isu tentang sistem pengendalian itern (SPI) mendapat perhatian cukup besar belakangan ini, BPK selaku auditor eksternal senantiasa menguji kekuatan SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Pemerintah sendiri kemudian menerbitkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang standar pengendalian itern pemerintahan. (Syukri dan Agus Fanar, 2009:142).

Pada tingkat pemerintah daerah, pengelolaan aset di Pemerintah Kota Bandung dalam kurun waktu 6 tahun terakhir selalu menjadi temuan BPK RI terkait opini wajar dengan pengecualian (WDP) oleh BPK dari laporan hasil audit terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemkot Bandung TA 2012. Empat catatan yang diberikan BPK terkait pengelolaan aset, yakni persoalan aset, kelemahan sistem pengendalian intern penatausahaan piutang dan pertanggungjawaban, Sistem pengendalian intern sewa tanah dan bangunan, serta hibah bansos. (Tomtom Dabbul Qomar : Pelaksana Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, 2013).

Mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan maka diharapkan laporan keuangan pemerintahan akan dapat diperbandingkan, sehingga sangat berguna untuk penilaian kinerja pemerintah daerah. Setiap unit kerja menentukan target dan tujuan serta merefleksikannya ke dalam suatu *performance plan* yang memberikan informasi mengenai jenis layanan yang disediakan, cara menyediakan layanan, obyek pemakai layanan, kualitas layanan yang diharapkan, dan tindakan yang diperlukan dalam menyediakan layanan. (Jones and Pendlebury, 2000).

Permasalahan pada sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuat keputusan. Sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik maka akan menyebabkan kualitas laporan keuangan daerah juga tidak baik. (Gamawan Fauzi : Mendagri, 2012).

Dengan masih banyaknya temuan yang berdasarkan kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. (Warisno, 2008).

Oleh karena itu berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan"

Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka Penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESI

Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Nurlan Darise (2008:4) pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

> "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah".

Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Nurlan Darise (2008:55) dapat di sebutkan prinsip akuntansi yang terkait dengan standar akuntansi pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

   a. Basis akrual
   b. Basis kas

2. Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

   a. Penilaian aset
   b. Penilaian kewajiban

3. Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

   a. Konsep layak temu biaya-pendapatan

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

   a. Penyajian transaksi secara wajar
   b. Penyajian peristiwa lainnya

5. Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

   a. Periode pelaporan

6. Konsistensi

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

   a. Penerapan metode akuntansi

7. Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

   a. Kelengkapan informasi laporan keuangan

8. Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

   a. Penyajian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern

Pengertian sistem pengendalian intern menurut I Gusti Agung Rai (2008:283) adalah sebagai berikut :

> "Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya".

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur-unsur pengendalian SPI yang diterapkan dipemerintah menurut PP No. 60 tahun 2008 terdiri atas :

1. Lingkungan pengendalian

Unsur sistem pengendalian intern yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian diwujudkan melalui :

   a. Penegakan integritas dan nilai etika
   b. Komitmen terhadap kompetensi
   c. Kepemimpinan yang kondusif
   d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
   e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
   f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan.

   a. Identifikasi risiko
   b. Analisis risiko

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

   a. Pengendalian Fisik Aset
   b. Pencatatan dan Dokumentasi

4. Informasi dan Komunikasi

Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non-keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

   a. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
   b. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

   a. Pemantauan berkelanjutan
   b. Evaluasi terpisah

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2010:13), menyatakan kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

> "Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya".

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Adapun penjelasan dari Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan *relevan* apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka masa lalu.

a) Memiliki umpan balik
b) Manfaat prediktif
c) Tepat waktu
d) Lengkap

2. Andal

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

a) Penyajian yang jujur
b) Dapat diverifikasi
c) Netralitas

3. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan.

a) Konsisten penerapan kebijakan akuntansi.
b) Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

4. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.

a) Bentuk informasi laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kerangka Pemikiran

Tujuan utama standar akuntansi pemerintah adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan keuangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji dengan pengguna laporan keuangan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah maka pelaporan keuangan lebih berkualitas. (Mahmudi, 2010:29).

Dibutuhkannya sistem yang memungkinkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang andal, maka dari itu standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern merupakan patokan apakah laporan keuangan berkualitas atau tidak. Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Pemerintah No. 60 Tahun 2008).

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut pandapat Deddi Nordiawan (2006:25), mengungkapkan bahwa penerapan SAP dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan yaitu sebagi berikut :

> "SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP

diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah".

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian InternTerhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2007:27), menyatakan terdapat hubungan terkait antara Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan adalah :

> "Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah".

Hipotesis

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

H_1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_2 : Sistem Pengendalian Internberpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif sebagai prosedur untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Desain Penelitian

Menurut Husein Umar (2005:30), desain penelitian adalah:

> "Desain Penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan desain penelitian dapat dilihat pada tabel 1 lampiran 1 hal. 14.

Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan dimensi, indikator dan skala dari variabel yang terkait dalam penelitian ini. Adapun variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Bebas (*Indevenden Varible*)

   Variabel independen dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintahan (X_1) dan sistem pengendalian intern sebagai (X_2).

2. Variabel Terikat (*Dependent Varaible*)

   Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel 3 lampiran 2 hal. 19.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer ini didapatkan melalui teknik-teknik sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

   Dalam teknik ini terdapat tiga cara yang dilakukan adalah :

   a) Observasi
   b) Kuesioner
   c) Wawancara

2. Studi Kepustakaan
   a. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode kuesioner.

Alat Ukur Penelitian

Uji Validitas

Validitas suatu data tercapai jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi *pearson product moment*.

Adapun rumus dari korelasi pearson adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n}}{\sqrt{\left[\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}\right]\left[\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}\right]}}$$

*Sumber : Cooper (2006:720)

Keterangan :

r = Koefisien korelasi *pearson product moment*
X = Skor item pertanyaan
Y = Skor total item pertanyaan
n = Jumlah responden dalam pelaksanaan uji coba instrumen

Pengujian validitas menggunakan korelasi *product moment* (indeks validitas) dinyatakan Barker *et al*. (2002) sebagai berikut :

> "Butir pernyataan dinyatakan valid jika koefisien korelasi butir pernyataan ≥ 0,30. Kemudian pengujian reliabilitas menggunakan metode *alpha-cronbach* dan dinyatakan reliabel jika koefisien reliabilitas > 0,70".

Uji keberartian koefisien r dilakukan dengan uji coba dengan t (taraf signifikasi) adalah 5%.

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus *Conbach Alpha* untuk menguji reabilitas. Pengujian reliabilitas untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan diolah berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada 42 responden di Instansi Pemerintah Kota Bandung.

Selanjutnya koefisien reliabilitas dibandingkan dengan 0,70, jika nilai koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,70 hasil pengujian reliabilitas dikatakan reliabel dalam mengungkap variabel yang sedang diteliti.

Uji MSI (Data Ordinal ke Interval)

Menurut Umi Narimawati (2010:47), uji MSI dijelaskan sebagai berikut :

> "Data yang didapatkan dari kuesioner merupakan data ordinal, sedangkan untuk menganalisis data diperlukan data interval, maka untuk memecahkan persoalan ini perlu ditingkatkan skala pengukurannya menjadi skala interval melalui *Method of Successive Interval*. Mengolah data ordinal menjadi interval dengan interval berurutan untuk variabel bebas terikat".

Populasi dan Penarikan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah 21 Instansi Pemerintah Kota Bandung dan kelompok yang dipilih sebagai responden adalah Kasubag Keuangan dan Bendahara. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sensus.

Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern(X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen (Y).

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)

a) Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :
   Ho : $\beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan.
   Ha : $\beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan.

b) Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Sistem Pengendalaian Intern terhadap variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :
   Ho : $\beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Sistem Pengendalaian Intern terhadap variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan.
   Ha : $\beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan Sistem Pengendalaian Intern terhadap variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Alat Analisis

Uji Validitas

Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji validitas butir pertanyaan dalam penelitian ini adalah korelasi *Pearson Product Moment.* Apabila nilai koefisien korelasi butir item pertanyaan yang sedang diuji lebih besar dari r-kritis sebesar 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut merupakan konstruksi yang valid.

Pada tabel terlihat bahwa nilai koefisien validitas setiap butir pernyataan mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada masing-masing variabel valid dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan uji validitas dapat dilihat pada tabel 1 lampiran 1 hal. 14.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach*. Kuesioner dikatakan andal apabila koefisien *reliabilitas* bernilai positif dan lebih besar dari pada 0,70. Pada tabel diketahui bahwa nilai reliabilitas butir pernyataan pada kuesioner masing-masing variabel yang sedang diteliti lebih besar dari 0,70 hasil ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada kuesioner andal untuk mengukur variabelnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan uji validitas dapat dilihat pada tabel 1 lampiran 1 hal. 14.

Profil Responden

1) Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Jumlah responden terbagi sama rata dimana sebanyak 21 orang atau 50% adalah responden yang berjenis kelamin Laki-laki dan responden yang berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 21 orang atau 50%.

2) Profil Berdasarkan Umur Responden

Mayoritas responden sebanyak 26 orang atau 26,62% adalah responden yang berusia 30 sampai dengan 40 tahun dan minoritas adalah responden yang berusia kurang dari 30 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau 1,2%. Hal tersebut menunjukan bahwa banyaknya responden yang berumur 30 tahun, dikarenakan pada usia umur 30 hingga 40 tahun masih termasuk dalam usia produktif yang mampu menjalankan tugas dengan baik.

3) Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Mayoritas responden sebanyak 33 orang atau 78,57% adalah responden yangberpendidikan S1 dan minoritas adalah responden yang berpendidikan DIPLOMA yaitu sebanyak 4 orang atau 9,52%. Berdasarkan data tersebut banyak responden dengan tingkat S1, karena adanya tuntutan untuk tingkat pendidikan yang tinggi sesuai dengan jabatan yang akan dipegang, hal ini menyebabkan responden dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi lebih banyak.

Analisis Deskriptif

Variabel Standar Akuntansi Pemrintahan (X_1)

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1), maka dilakukan pengkategorian dengan cara menjumlahkan skor jawaban dari 42 responden dan 11 pernyataan. Kemudian dilakukan perhitungan skor ideal dengan rumus sebagai berikut :

Skor Ideal = n x k x Nilai Maksimal
= 42 x 11 x 5
= 2310

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$
$$= \frac{1887}{2310} \times 100\%$$
= 81,7%

Variabel Sistem Pengendalain Intern (X_2)

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang variabel Sistem Pengendalian Intern (X_2), maka dilakukan pengkategorian dengan cara menjumlahkan skor jawaban dari 42 responden dan 14 pernyataan. Kemudian dilakukan perhitungan skor ideal dengan rumus sebagai berikut :

Skor Ideal = n x k x Nilai Maksimal
= 42 x 14 x 5
= 2940

$$\text{Persetase} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$
$$= \frac{2669}{2940} \text{x } 100\%$$
= 79.15%

Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y), maka dilakukan pengkategorian dengan cara menjumlahkan skor jawaban dari 42

responden dan 10 pernyataan. Kemudian dilakukan perhitungan skor ideal dengan rumus sebagai berikut :

Skor Ideal = n x k x Nilai Maksimal
= 42 x 10 x 5
= 2100

Persetase $= \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$
$= \frac{1722}{2100}$ x 100%
= 82%

Uji Asumsi Regresi Linier
Uji Normalitas

Analisis kenormalan berdasarkan metode *Kolmogorov-Smirnov* mensyaratkan kurva normal apabila nilai *Asymp. Sig* berada di atas batas *maximum error*, yaitu 0,05. Adapun dalam analisis regresi, yang diuji kenormalan adalah residual atau variabel gangguan yang bersifat stokastik acak, maka data di atas dapat digunakan karena variable residu berdistribusi normal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan uji validitas dapat dilihat pada tabel 1 lampiran 1 hal. 14.

Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factors*. Dari output SPSS dapat dilihat bahwa nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam data. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan uji validitas dapat dilihat pada tabel 1 lampiran 1 hal. 14.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan setiap variable bebas dengan nilai mutlak residualnya menggunakan korelasi *Rank Spearman*. Dari output SPSS dapat dilihat bahwa terdapat korelasi yang tidak signifikan. Hal ini dilihat dari nilai p-value (*Sig*) yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan uji validitas dapat dilihat pada tabel 1 lampiran 1 hal. 14.

Analisis Verifikatif
Analisis korelasi Pearson Product Moment

Analisis korelasi *Pearson Product Moment* adalah suatu analisis yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua atau lebih variabel bila data variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari masing-masing variabel adalah sama.

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, dapat diketahui bahwa adanya hubungan antar variabel sebagai berikut :

1) **Hubungan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

   Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 0,746.

2) **Hubungan Sistem Pengendalian Intern (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

   Nilai koefisien korelasi antara variabel Sistem Pengendalian Intern dan variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 0,705.

Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi, maka koefisien korelasi sebesar 0,746 dan 0,705 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas dengan variabel

terikat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan uji validitas dapat dilihat pada tabel 1 lampiran 1 hal. 14.

Hal ini dapat dikuatkan dengan teori penghubung yang dikemukakan Mahmudi (2007:27), menyatakan bahwa adanya hubungan terkait antara Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan adalah :

> "Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah".

Analisis Regresi

1) Persamaan Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah :

$$\mathbf{Y = b_1.X_1 + b_2.X_2 + e}$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan
X_1 = Standar Akuntansi Pemerintahan
X_2 = Sistem Pengendalian Intern
b = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
e = Nilai Residual

Berdasarkan hasil output SPSS di atas terlihat nilai koefesien regresi pada nilai *Unstandardized Coefficients "B"*, sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

KLK = 0,552 (SAP) + 0,280 (SPI) + e

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a) Nilai Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) sebesar 0,552 memiliki arti bahwa jika Standar Akuntansi Pemerintahan mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) sedangkan variabel Sistem Pengendalian Intern konstan, maka Kualitas Laporan Keuangan yang akan didapat sebesar 0,552.
b) Nilai Sistem Pengendalian Intern (X_2) sebesar 0,280 memiliki arti bahwa jika Sistem Pengendalian Intern mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) sedangkan variabel Standar Akuntansi Pemerintahan konstan, maka Kualitas Laporan Keuangan yang akan didapat sebesar 0,280.

2) Pengaruh Variabel (X_1) terhadap Variabel (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan persentase pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka dapat diketahui bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan yaitu dengan nilai sebesar $(0,506)^2$ x 100% = 25,60%.

3) Pengaruh Variabel (X_2) terhadap Variabel (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan persentase pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka dapat diketahui bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern (X_2) memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan yaitu dengan nilai sebesar $(0,348)^2 \times 100\% = 12,11\%$.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

a) Pengujian hipotesis parsial variabel Standar Akuntansi Pemrintahan (X_1)

H_0 : Standar Akuntansi Pemrintahan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

H_a : Standar Akuntansi Pemrintahan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Kriteria pengujian :

Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai p (Sig.) < α

Terima H_0 dan tolak H_a jika nilai p (Sig.) > α

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) sebesar 3,697 dan nilai p = 0,001. Dikarenakan nilai p < 0,05 maka H_0 ditolak, artinya Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kulaitas Laporan Keuangan (Y).

b) Pengujian hipotesis parsial variabel Sistem Pengendalian Intern (X_2)

H_0 : Sistem Pengendalian Intern (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

H_a : Sistem Pengendalian Intern (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Kriteria pengujian :

Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai p (Sig.) < α

Terima H_0 dan tolak H_a jika nilai p (Sig.) > α

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Sistem Pengendalian Intern (X_2) sebesar 2,544 dan nilai p = 0,015. Dikarenakan nilai p < 0,05 maka H_0 ditolak, artinya Sistem Pengendalian Intern (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kulaitas Laporan Keuangan (Y).

Pembahasan

Dari hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, artinya semakin baik diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan dalam proses pelaporan dan pencatatan keuangan serta semakin baik diterapkannya Sistem Pengendalian Intern maka penyajian laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas pada Instansi Pemerintah Kota Bandung.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil perhitungan regresi maka Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan nilai sebesar 25,60% dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,746. Hal ini membuktikan bahwa penerapan SAP dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Halim, dkk (2010:94) mengungkapkan bahwa penerapan SAP memberikan pedoman kepada pemda dalam meningkatkan kredibilitas laporan. Kredibilitas laporan dapat dipergunakan sebagai prasyarat normatif yang harus dipenuhi pemda agar laporan keuangan pemda memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu memenuhi empat karakteristik yaitu (1) dapat dipahami, (2) relevan, (3) andal, dan (4) dapat diperbandingkan. Dengan adanya penerapan standar atau ukuran tersebut diharapkan dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sedangkan yang terjadi dilapangan ditemukan bahwa permasalahan pada sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuat keputusan. Sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan

dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik maka akan menyebabkan kualitas laporan keuangan daerah juga tidak baik. (Beny Marten, 2014).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewajaran dalam penyajian laporan keuangan Instansi Pemerintah Kota Bandung mempengaruhi relevansi para pengguna laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari (2014) yang menyebutkan bahwa adanya pengaruh pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan dapat dibuktikan dengan besaran koefisien $\beta 1 \neq 0$ yaitu 0,431 > 0. Artinya, setiap dilakukan peningkatan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan kepada aparatur pemerintah, khususnya pada pegawai pengelola keuangan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari peritungan regresi maka Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan nilai sebesar 12,11% dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,705. Hal ini membuktikan bahwa jika Sistem Pengendalian Intern dilakukan dengan baik maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2007:27) mengungkapkan bahwa pengawasan intern merupakan suatu pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dan memperlancar pelaksanaan tugas, dalam hal ini pengawasan intern harus dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi, empat catatan yang diberikan BPK terkait pengelolaan aset yakni pengelolaan aset di Pemerintah Kota Bandung dalam kurun waktu 6 tahun terakhir selalu menjadi temuan BPK RI terkait opini WDP oleh BPK dari laporan hasil audit terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemkot Bandung TA 2012. Kelemahan sistem pengendalian intern penatausahaan piutang dan pertanggungjawaban, sistem pengendalian intern sewa tanah dan bangunan, serta hibah bansos menjadi permasalahan yang belum ada perbaikan secara signifikan. (Tomtom Dabbul Qomar, 2013).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komitmen terhadap penetapan prosedur kegiatan dalam pengawasan dan pengendalian fisik aset dapat mempengaruhi terhadap keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tuti Herawati (2014) yang menyebutkan bahwa koefisien regresi X_1 adalah 0.37, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar satu satuan nilai akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.37 satuan nilai atau 37% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisa mengenai pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini menunjukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan sehingga hasil laporan keuangan berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung tergolong kedalam kategori baik, artinya Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung belum terbilang kedalam kategori yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena petugas yang bertanggungjawab khususnya pada bidang keuangan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan PP No. 71 tahun 2010.
2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Intern telah diterapkan sehingga aturan-aturan mengenai pengendalian dan wewenang atau tanggungjawab secara sistem dapat meningkatkan efektivitas dan ketelitian terhadap pendokumentasian data-data aset

Pemerintah Kota Bandung. Sistem Pengendalian Intern pada Instansi Pemerintah Kota Bandung tergolong kedalam kategori baik, artinya Sistem Pengendalian Intern belum terbilang kedalam kategori yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena petugas/pejabat yang bertanggungjawab belum menerapkannya secara maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008.

Saran

1. Setiap instansi dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) guna menghasilkan laporan keuangan yang benar-benar berkualitas. Sementara itu opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung yaitu WDP TA 2010-2013, ini disinyalir adanya ketidak seriusan Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola aset daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa indikator dari dimensi konsistensi dan penyajian wajar mendapat presentase terendah dibandingkan yang lainnya, maka dari itu perlu adanya ketelitian dan ketetapan yang jelas dalam pelaporan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal, meskipun sudah berada dalam kategori baik tetapi konsistensi dan penyajian wajar masih perlu ditingkatkan lagi mengenai pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan-nya agar bisa masuk kedalam kategori yang sangat baik. Dengan adanya penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kredibilitas laporan di pemerintahan pusat dan daerah, serta dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 guna menghasilkan laporan keuangan yang benar-benar berkualitas. Sementara itu kelemahan Sistem Pengendalian Intern terjadi karena para pejabat atau pelaksana yang bertanggungjawab tidak melakukan pencatatan secara akurat dan belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian. Hasil penelitian membuktikan bahwa indikator komitmen terhadap kompetensi dan analisis resiko mendapat presentase terendah dibandingkan yang lainnya, maka dari itu pimpinan instansi harus berkonsentrasi pada penetapan tujuan instansi dan menganalisis resiko pada saat terjadi perubahan serta perlu adanya peningkatan standar kompetensi untuk menghasilkan SDM yang berkompeten. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan dan prosedur yang dirancang dapat memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan serta pengamanan terhadap aset negara. Meskipun sudah berada dalam kategori baik tetapi komitmen terhadap kompetensi dan analisis resiko, masih perlu ditingkatkan lagi sesuai ketentuan PP No. 60 tahun 2008 agar bisa masuk kedalam kategori yang sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung. 2010. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta. Salemba Empat. ISBN : 978-979-061-044-6.

Abdul Halim. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat. ISBN : 978-979-061-227-3.

Andi Supangat. 2008. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Parametrik*. Jakarta : Kencana Prenada.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI. ISBN : 979-533-781-5.

_____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta : Andi. ISBN : 979-731-158-9.

Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama. ISBN : 979-538-158-2.

Riduwan dan Sunarto. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2004. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.

Umi Narimawati. 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Agung Media.

_____. 2008. *Teknik-teknik Analisis Multivariat Untuk Riset Ekonomi (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
_____. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta : Genesis.

Jurnal :

Ovita Charolina. 2013. *Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan KPU*. Jurnal Fairnes Volume 3, Nomor 3,: 82-94. ISSN 2303-0348.

I Putu Upabayu Rama Mahaputra & I Wayan Putra. 2014. *Analisi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 8, No. 2. ISSN: 2302-8556.

Jamanson Sinaga. 2005. *Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 1, No. 2.

Arif Ardi Kusumah. 2008. *Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya)*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, Jurnal Akuntansi FE Unsil Vol. 3, No. 2. ISSN : 1907-9958.

Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, I Made Pradana Adiputra & Edy Sujana. 2014. *Pengaruh Pemahaman SAP dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana)*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Volume 2 No. 1.

Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati & Ni Kadek Sinarwati. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sisitem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 2 No. 1.

Peraturan Perundangan :

Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
_____, RI No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
_____, RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat. ISBN : 978-979-061-217-4.

Tabel 1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	**Metode Yang Digunakan**	**Unit Analisis**	**Time Horizon**
T – 1	*Descriptive*	*Decriptive dan verifikative*	Instansi Pemerintah Kota	*Cross Sectional*
T – 2	*Descriptive*	*Decriptive dan verifikative*	Instansi Pemerintah Kota	*Cross Sectional*

*Sumber : Umi Narimawati (2010:31)

Tabel 2
Daftar Instansi dan Lokasi Penelitian

No.	Instansi	Alamat
1	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Jl. Cianjur No.34 Bandung Telp. (022) 7 278853
2	Dinas Kebakaran	Jl. Sukabumi No.17 Bandung Telp. (022)7207113
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	JL. Ahmad Yani No. 227 Bandung Telp. (022) 22 7271724
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Ambon No.1 Bandung Telp. (022) 4209891
5	Dinas Kesehatan	Jl. Supratman No.73 Bandung Telp. (022) 4203752 / 7202210
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Wastukancana No 2 Bandung Telp. (022) 4234892
7	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan	Jl. Kawaluyaan No. 2 Bandung Telp. (022) 7308358
8	Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	Jl. Wastukencana No.2 Bandung Telp. (022) 7215323
9	Dinas Pemakaman dan Pertamanan	Jl. Ambon No.1 A Bandung Telp. (022) 4231921
10	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Jl. Aceh No. 47-49 Telp. (022) 4268750
11	Dinas Pendidikan	Jl.A.Yani No. 239 Bandung Telp. (022) 7106568
12	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	Jl. Wastukancana No. 2 Bandung Telp. (022) 4204445
13	Dinas Perhubungan	Jl. Soekarno Hatta No 205 Bandung Telp. (022) 5220768
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jl. Arjuna No.45 Bandung Telp. (022) 6015102
15	Dinas Sosial	Jl. Sindang sirna no 40 Bandung Telp. (022) 2013139
16	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Jalan Cianjur No. 34 Bandung Telp. (022) 7217451
17	Dinas Tenaga Kerja	Jl. RE. Martanegara No. 4 Bandung Telp. (022) 7311330 / 7313130
18	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Jl. Wastukancana No. 2 Bandung Telp. (022) 4206190

19	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)	Jl.Cianjur No. 34 Bandung Telp. (022) 7217663 / 7217587
20	Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH)	Jl. Sadang Tengah No. 4 & 6 Bandung Telp.(022) 2514327 / 2511513
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	Jl. Taman Sari No. 76 Bandung Telp. (022) 2501233 / 2501316

*Sumber : http://bandung.go.id/rwd/index.php

Table 3
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No. Kuesioner
Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1)	Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	1. Basis Akuntansi	a. Basis akrual. b. Basis kas.	Ordinal	1-2
		2. Nilai Historis	a. Penilaian aset. b. Penilaian kewajiban.		3-4
		3. Realisasi	c. Konsep layak temu biaya-pendapatan.		5
		4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal	a. Penyajian transaksi secara wajar. b. Penyajian peristiwa lainnya.		6-7
		5. Periodisitas	a. Periode pelaporan.		8
		6. Konsistensi	a. Penerapan metode akuntansi.		9
		7. Pengungkapan Lengkap	a. Kelengkapan informasi laporan keuangan.		10
		8. Penyajian Wajar	a. Penyajian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.		11
	Nurlan Darise (2008:55)	**Nurlan Darise (2008:55)**	**Nurlan Darise (2008:55)**		
Sistem Pengendalian Intern (X_2)	Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada	1. Lingkungan pengendalian	a. Penegakan integritas dan nilai etika b. Komitmen terhadap kompetensi c. Kepemimpinan yang	Ordinal	12-17

	tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi		kondusif d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia		
	melalui kegiatan yang efektif dan	2. Penilaian Risiko	a. Identifikasi risiko b. Analisis risiko		18-19
	efisien,keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara	3. Kegiatan Pengendalian	a. Pengendalian Fisik Aset b. Pencatatan Dokumentasi		20-21
	dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	4. Informasi dan Komunikasi	a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus		22-23
		5. Pemantauan Pengendalian Intern	a. Pemantauan berkelanjutan b. Evaluasi terpisah		24-25
	I Gusti Agung Rai (2008:283)	**I Gusti Agung Rai (2008:283)**	**I Gusti Agung Rai (2008:283)**		
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Kualitas Laporan keuangan adalah ukuran-ukuran	1. Relevan	a) Memiliki umpan balik b) Manfaat prediktif c) Tepat waktu d) Lengkap	Ordinal	26-29
	normative yang perlu diwujudkan dalam	2. Andal	a) Penyajian yang jujur b) Dapat diverifikasi c) Netralita		30-32
	informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi	3. Dapat dibandingkan	a) Konsisten penerapan kebijakan akuntansi. b) Informasi yang termuat dalam		33-34
	tujuannya	4. Dapat dipahami	a. Bentuk informasi		35

	Nurlan Darise (2008:53)	**Nurlan Darise (2008:53)**	laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. **Nurlan Darise (2008:53)**		

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Kuesioner Standar Akuntansi Pemerintahan

Correlations

Variables=X1

	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N
p1	.641	.000	42
p2	.662	.000	42
p3	.697	.000	42
p4	.643	.000	42
p5	.591	.000	42
p6	.784	.000	42
p7	.508	.001	42
p8	.716	.000	42
p9	.333	.031	42
p10	.721	.000	42
p11	.699	.000	42
X1	1		42

*Sumber : Data primer yang telah diolah, 2014

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Kuesioner Sistem Pengendalian Intern

Correlations

Variables=X2

	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N
p12	.499	.001	42
p13	.492	.001	42
p14	.630	.000	42
p15	.670	.000	42
p16	.645	.000	42
p17	.606	.000	42
p18	.706	.000	42
p19	.653	.000	42
p20	.463	.002	42
p21	.637	.000	42
p22	.749	.000	42
p23	.490	.001	42
p24	.511	.001	42
p25	.501	.001	42
X2	1		42

*Sumber : Data primer yang telah diolah, 2014

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Kuesioner Kualitas Laporan Keuangan

Correlations

Variables=Y

	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N
p26	.771	.000	42
p27	.733	.000	42
p28	.714	.000	42
p29	.822	.000	42
p30	.873	.000	42
p31	.794	.000	42
p32	.747	.000	42
p33	.718	.000	42
p34	.794	.000	42
p35	.715	.000	42
Y	1		42

*Sumber : Data primer yang telah diolah, 2014

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Kesimpulan
Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1)	0.81	Reliabel
Sisntem Pengendalian Intern (X_2)	0.84	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.88	Reliabel

*Sumber : Data primer yang telah diolah, 2014

Tabel 8
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	21	50%
2	Perempuan	21	50%
Total		**42**	**100.00%**

*Sumber : Data primer yang telah diolah, 2014

Tabel 9
Gambaran Banyaknya Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase
1	< 30 tahun	1	1,2%
2	30 - 40 tahun	26	26,62%
3	> 50 tahun	15	15,34%
Total		**42**	**100%**

*Sumber : Data primer yang telah diolah, 2014

Tabel 10
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	DIPLOMA	4	9,52%
2	S1	33	78,57%
3	S2	5	19,50%
Total		**42**	**100.00%**

*Sumber : Data primer yang telah diolah, 2014

Tabel 11
Koefisien Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.699	5.036		.139	.890
	SAP	.552	.149	.506	3.697	.001
	SIP	.280	.110	.348	2.544	.015

a. Dependent Variable: KLK

Tabel 12
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		SAP	SPI	KLK
N		42	42	42
Normal Parameters[a,,b]	Mean	34.7574	40.5447	29.5815
	Std. Deviation	5.22374	6.74748	5.74345
Most Extreme Differences	Absolute	.235	.205	.333
	Positive	.235	.147	.333
	Negative	-.198	-.205	-.167
Kolmogorov-Smirnov Z		1.524	1.326	2.157
Asymp. Sig. (2-tailed)		.064	.060	.073

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 13
Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SAP	.516	1.938
	SPI	.516	1.938

a. Dependent Variable: KLK

Tabel 14
Uji Autokorelasi

Correlations

Variables2=Unstandardized Residual

		Correlation Coefficient	Sig. (2-tailed)	N
SAP	Spearman's rho	-.061	.700	42
SPI	Spearman's rho	.067	.673	42
Unstandardized Residual	Spearman's rho	1.000	.	42

Tabel 15
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.699	5.036		.139	.890
	SAP	.552	.149	.506	3.697	.001
	SPI	.280	.110	.348	2.544	.015

a. Dependent Variable: KLK